



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN  
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2016-2020**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Amalia Sari

4417030019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2021**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN  
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2016-2020**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan

Akuntansi Keuangan

Disusun Oleh:

Amalia Sari

4417030019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
2021**




## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk dengan etika ilmiah.

Nama : Amalia Sari

NIM : 4417030019

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13/08/2021



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Amalia Sari

NIM : 4417030019

Program Studi : Sarjana Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah  
Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : Nedsal Sixpria, S.E., Ak., M.M., CA (  )

Anggota Penguji : Titi Suhartati, S. E., Ak., M. M., M. Ak (  )

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 07 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Sabar Warsini, S. E, M. M

NIP: 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pada tanggal 13 Agustus 2021 skripsi penelitian terapan atas:

Nama penyusun : Amalia Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030019  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Titi Suhartati, S. E., Ak., M. M., M. Ak.

NIP: 196901111998022001

Pembimbing II

Herbirowo Nugroho, S. E, M. Si.

NIP: 197202221999031003

Diketahui Oleh:

Kepala Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S. E, M. Si.

NIP. 197202221999031003



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020” sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melibatkan beberapa pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun non-materil, bimbingan, saran, dan motivasi selama penulis Menyusun skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Sabar Warsini S. E., M. M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Herbirowo Nygroho S. E, M. Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Titi Suhartati S. E., Ak., M. M., M. Ak., selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, waktu, dan motivasi kepada penulis dengan setulus hati.
4. Bapak Herbirowo Nugroho S. E., M. Si., selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, waktu, dan motivasi kepada penulis dengan setulus hati.
5. Seluruh staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dakwat dan Ibu Halimah atas segala bentuk doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Soheri dan Ibu Aini selaku kerabat penulis yang selalu memberikan motivasi, saran dan masukan kepada penulis.
8. Syifah, Anis, Nabila, Intan selaku sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
9. Julia, Gusti dan Ryan selaku sahabat-sahabat tercinta yang dengan setia dan sabar menemani selama masa perkuliahan serta memberikan dukungan dalam suka dan duka selama penyusunan skripsi.
10. Teman-teman seperbimbingan Ibu Titi dan Bapak Herbi atas segala bantuan yang diberikan selama masa bimbingan.
11. Teman-teman AKT A dan B yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.
12. Stray Kids yang selalu memberikan motivasi kepada penulis melalui karya-karya mereka.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menerima kritik dan saran dengan senang hati demi

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Sari  
NIM : 4417030019  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non -exclusive Royalti-Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 13/08/2021

Yang menyatakan



Amalia Sari

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







## Analisis Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020

Oleh :

Amalia Sari

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atau dengan konsep *value for money* dan untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan indeks kemampuan keuangan.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemprov DKI Jakarta Khususnya berupa data-data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemprov DKI Jakarta sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan rasio ekonomis berada pada tingkat cukup ekonomis hal ini dikarenakan masih banyak anggaran belanja daerah yang tidak terealisasi, rasio efisiensi berada pada tingkat cukup efisien hal ini terjadi dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan daripada pendapatan yang diterima, untuk rasio efektivitas berada pada tingkat efektif hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pendapatan yang tidak mencapai target pendapatan. Kemampuan keuangan Pemprov DKI Jakarta berada pada kuadran I yaitu tipe paling ideal dan skala indeks kemampuan pada tingkat 0,46 yaitu Pemprov dengan kemampuan keuangan daerah yang Tinggi.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Value for Money, Kemampuan Keuangan Daerah

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Analysis of Regional Financial Performance and Capability Measurement  
DKI Jakarta Provincial Government Period 2016-2020*

By:

*Amalia Sari*

*Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program*

**ABSTRACT**

*The research aims to identify and analyze the financial performance on the DKI Jakarta Provincial Government measured by using economic ratios, efficiency, and effectiveness or by the context value for money and to identify and analyze the financial capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government using the financial capacity indexes.*

*This approach is a descriptive approach to research and presents data received from the DKI Jakarta Provincial Government specifically data from the Pemprov Revenue and Expenditure so it provides a clear picture for the author to analyze and compare the budget with existing theory.*

*The results of the study show that the performance of the DKI Jakarta Provincial Government using economic ratios is at fairly economical level, this is because the are still many unrealized regional budgets, the efficiency ratio is at a fairly efficient level. Effectiveness is at the effective level, this show that there is still income that does not reach the revenue target. The DKI Jakarta Provincial Government financial capacity is in quadrant I, which is the most idea type and the capability index scale is at 0,46 level, namely the Provincial Government with high regional financial capabilities.*

**Keywords:** *Regional financial performance, economic ratio, efficiency, effectiveness, value for money, regional financial capability*

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Keuangan Daerah .....	8
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	8
2.2.1 Anggaran Pendapatan Daerah.....	8
2.2.2 Anggaran Belanja Daerah.....	9
2.3 Laporan Realisasi Anggaran.....	9
2.4 Pengukuran Kinerja.....	9
2.5 Kinerja Keuangan.....	10
2.6 <i>Value For Money</i> .....	12
2.6.1 Pengukuran Ekonomis .....	13
2.6.2 Pengukuran Efisiensi .....	14
2.6.3 Pengukuran Efektivitas .....	15



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.7 Konsep Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah.....	15
2.8 Peneliti Terdahulu .....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Objek Penelitian .....	21
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	21
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	22
3.5 Metode Analisis Data .....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Hasil Penelitian .....	24
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
4.1.2 Analisis Data .....	26
4.2 Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN.....	53





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi PAD Periode 2016-2020.....	3
Tabel 1.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 2016-2020.....	3
Table 1.3 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Periode 2016-2020 .....	4
Table 2.1 Klasifikasi Pengukuran Ekonomis .....	11
Table 2.2 Klasifikasi Pengukuran Efisiensi .....	12
Table 2.3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas ... ..	13
Table 2.4 Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadra .....	14
Table 2.5 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah .....	14
Table 2.6 Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah.....	15
Table 2.7 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Rasio Ekonomis Pemprov DKI Jakarta .....	27
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Pemprov DKI Jakarta.....	29
Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Pemprov DKI Jakarta .....	31
Tabel 4.4 Rasio Peranan ( <i>Share</i> ) APBD Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020.....	33
Tabel 4.5 Rasio Pertumbuhan ( <i>Growth</i> ) APBD Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020.....	33
Tabel 4.6 Peta Kemampuan Keuangan Daerah .....	33
Tabel 4.7 Peta Kemampuan Keuangan DKI Jakarta Periode 2016-2020 .....	33
Tabel 4.8 Elastisitas PAD Terhadap Belanja Langsung .....	35
Tabel 4.9 Indeks Elastisitas PAD Terhadap Belanja Langsung.....	35
Tabel 4.10 Indeks Pertumbuhan PAD ( <i>Growth</i> ) .....	36
Tabel 4.11 Rasio <i>Share</i> PAD Terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.....	37
Tabel 4.12 Indeks Peran PAD ( <i>Share</i> ) .....	38



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....20





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016 .....	53
Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017 .....	54
Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2018 .....	55
Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 .....	56
Lampiran 5: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020 .....	57





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform* (Albasiah, 2012). Maka untuk mencapai pembangunan suatu daerah diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didalamnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan daerahnya dan pelayanan kepada sosial masyarakat (Machmud, 2014).





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi (Kurniawati, 2016).

Tuntutan ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintah yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* (VfM) dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Ekonomi terkait dengan sejauh mana pemerintah dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros, efisien terkait pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, dan efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan daerah, artinya daerah harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim, 2007). DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang penerimaan PAD nya cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan besarnya PAD yang diterima diharapkan DKI Jakarta dapat membiayai sendiri program-program daerahnya sehingga DKI Jakarta tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dalam urusan



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pemerintah daerahnya. Data PAD DKI Jakarta selama lima tahun terakhir tersaji sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi PAD Periode 2016-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		%
	Anggaran	Realisasi	
2016	38.501.784.839.738	36.888.017.587.716	95,81
2017	41.687.387.826.535	43.901.488.807.743	105,31
2018	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,89
2019	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90
2020	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24

Sumber: PPID DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi target dengan prosentase pencapaian sebesar 95,81%, tahun 2017 realisasi PAD melampaui target dengan prosentase sebesar 105,31%, sedangkan pada tahun 2018-2020 realisasi PAD belum memenuhi target dengan prosentasi pencapaian sebesar 97,89%, 89,90%, dan 98,24%. Besarnya PAD yang diterima DKI Jakarta seharusnya dapat membiayai program-program daerahnya, akan tetapi masih banyak program-program DKI Jakarta yang belum terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan belanja daerah DKI Jakarta selama lima tahun terakhir. Berikut data anggaran dan realisasi belanja DKI Jakarta periode 2016-2020:

**Table 1.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 2016-2020**

Tahun	Belanja		(%)
	Anggaran	Realisasi	
2016	57.149.280.800.656	46.918.496.211.824	82,10
2017	61.457.200.230.480	50.721.960.241.767	82,53
2018	74.729.343.746.013	61.063.848.818.057	81,71
2019	77.010.363.876.861	64.099.287.469.013	83,23
2020	58.579.713.267.668	51.716.860.929.662	88,28

Sumber : PPID DKI Jakarta

Berdasarkan data tersebut, realisasi belanja daerah DKI Jakarta selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 realisasi belanja hanya sebesar 82,10%, pada tahun 2017 realisasi belanja mengalami kenaikan akan tetapi tidak signifikan yaitu sebesar 82,53%, pada tahun 2018 realisasi belanja mengalami penurunan dengan prosentase serapan sebesar 81,71%,



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi belanja mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan prosentasi sebesar 83,23% dan 88,28%. Rendahnya realisasi belanja menunjukkan kinerja DKI Jakarta belum ekonomis dalam menjalankan program-program daerahnya.

Selain pendapatan asli daerah, DKI Jakarta juga menerima dana dari pemerintah pusat guna untuk membantu membiayai program-program daerahnya, dengan adanya dana dari Pemerintah Pusat seharusnya DKI Jakarta dapat membiayai seluruh program-program daerahnya akan tetapi masih banyak program daerahnya yang tidak terealisasi. Berikut data anggaran dan realisasi total pendapatan DKI Jakarta periode 2016-2020:

**Table 1.3 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan  
Periode 2016-2020**

Tahun	Pendapatan		(% )
	Anggaran	Realisasi	
2016	57.161.248.465.732	53.784.706.312.513	94,09
2017	62.517.744.026.535	64.823.887.369.820	103,69
2018	65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05
2019	74.997.497.375.481	62.300.679.833.068	83,07
2020	57.234.618.765.469	55.887.004.237.727	97,65

Sumber: PPID DKI Jakarta

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan pada tahun 2016 belum memenuhi target dengan prosentasi pencapaian sebesar 94,09%, pada tahun 2017 realisasi melampaui target dengan penerimaan sebesar 103,69%, pada tahun 2018 dan 2019 realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan prosentasi pencapaian sebesar 93,05% dan 83,07%, pada tahun 2020 DKI Jakarta berhasil menaikkan realisasi pendapatan dengan penerimaan sebesar 97,65%. Dari data tersebut menunjukkan kinerja DKI Jakarta masih terdapat kinerja yang belum efisien dan efektif dimana realisasi belanja pada tahun 2019 lebih besar dari realisasi pendapatan.

Kinerja pemerintah daerah menjadi poin penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja pemerintah daerah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyat untuk mencapai kesejahteraan (Mirza, 2012). Hasil pertanggung jawaban kinerja



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

keuangan akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kinerja keuangan daerah sudah baik. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja keuangan dan kemampuan keuangan guna melihat keberhasilan pemerintah daerah mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan mengedepankan nilai *value for money* dan mampu dalam mengelola keuangan daerah sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat dan mampu membiayai sendiri urusan pemerintahannya (Mustarim, Rosnawitang, dan Akib, 2020).

### 1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta selama periode 2016-2020 cenderung meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak program-program daerah DKI Jakarta yang tidak terealisasi. Rendahnya realisasi belanja daerah dikarenakan banyak program-program daerah yang terbengkalai, seperti program pengendalian banjir yang tidak terealisasi hal ini akan berdampak kepada masyarakat ketika banjir melanda pemukiman warga maupun jalanan di Jakarta. Kemampuan DKI Jakarta dalam menghasilkan PAD yang besar diharapkan dapat mewujudkan otonomi daerah yang tidak bergantung terhadap Pemerintah Pusat akan tetapi pada kenyataannya DKI Jakarta masih bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk membantu membiayai program-program daerahnya.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio ekonomis pada tahun 2016-2020?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2016-2020?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2016-2020?
4. Bagaimana kemampuan keuangan DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerahnya?



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio ekonomis pada tahun 2016-2020.
2. Menjelaskan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2016-2020.
3. Menjelaskan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2016-2020.
4. Menjelaskan hasil pengukuran kemampuan keuangan DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerahnya.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah DKI Jakarta selama periode yang ditentukan.
2. Praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mampu memaksimalkan penerimaan potensi daerah yang dimiliki.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, batasan dan sistematika penulisan.

#### BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

#### BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode penentuan sampel, sumber data penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis data.

## BAB IV Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pemprov DKI Jakarta, analisis kinerja keuangan dengan prinsip *value for money*, serta menganalisis kemampuan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta.

## BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta selama periode 2016-2020 berada pada kriteria cukup ekonomis dengan rasio ekonomis berada pada tingkat 80%-90% , hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anggaran belanja daerah terutama belanja modal yang tidak terealisasi selama periode 2016-2020 seperti, pembebasan tanah untuk ruang terbuka hijau, pembebasan tanah untuk waduk, dan lain-lain. Walaupun demikian, Pemprov DKI Jakarta selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi belanja daerahnya, hal ini dapat dilihat dari tingkat realisasi belanja daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan tingkat realisasi sebesar 88,28%.
2. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016 berada pada kriteria cukup efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 87,23%, pada tahun 2017 berada pada kriteria efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 78,25%, pada tahun 2019 dan 2020 kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria kurang efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 99,72% dan 92,54%, serta pada tahun 2019 berada pada kriteria tidak ekonomis dengan tingkat efisiensi sebesar 102,89%. Kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria tidak efisien dikarenakan belanja daerah yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta selama lima tahun terakhir berada pada kriteria kurang efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 92,13%.
3. Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016-2020 sudah efektif. Kinerja keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta berada pada tingkat yang sangat efektif terjadi pada tahun 2018 dimana tingkat efektivitasnya sebesar 103,69%, akan tetapi pada

tahun berikutnya kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan hal ini dikarenakan penurunan penerimaan pajak daerah terutama pajak daerah yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) walaupun demikian kinerja keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta masih berada pada tingkat efektif dengan rasio efektivitas diantara 90%-100%. Adapun selama lima tahun terakhir jika dilihat secara keseluruhan kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta berada pada kriteria efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 94,31%.

4. Berdasarkan perhitungan rasio *share* dan *growth* terhadap realisasi PAD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016-2020, maka diperoleh rata-rata rasio peranan PAD (*share*) sebesar 75,95% dan rasio pertumbuhan PAD (*growth*) sebesar 101,26%. Dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, maka kemampuan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016 dan 2017 termasuk kedalam kuadran I, dimana kondisi ini merupakan kondisi paling ideal, PAD mengambil peran besar dalam total belanja dan Pemprov DKI Jakarta mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Pada tahun 2018 dan 2020 kemampuan keuangan daerah DKI Jakarta berada pada kuadran IV, dimana PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja. Pada tahun 2019 kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran III, dimana PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD nya rendah. Berdasarkan perhitungan indeks elastisitas, indeks *share* dan indeks *growth* maka diperoleh Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016-2020 yaitu sebesar 0,46 dan berada pada kategori tinggi hal ini memberikan indikasi adanya kesiapan DKI Jakarta dalam era otonomi, khususnya dalam tingkat kemampuan dan pengalaman mengelola keuangan, kekayaan serta sumber-sumber potensial lain yang dimiliki.

## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







## 1.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

1. DKI Jakarta diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah yang kurang dimaksimalkan, dan memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah terutama belanja modal seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, infrastruktur pengelolaan sampah, dan program lainnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi pemborosan dana, dapat mengefisienkan anggaran belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihan untuk menjalankan program-program daerahnya. DKI Jakarta juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Selain itu DKI Jakarta diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi daerah yang dimilikinya seperti potensi penerimaan pajak yang berasal dari kendaraan, pajak restoran yang berasal dari rumah makan, dan potensi penerimaan retribusi yang bersumber dari pusat perbelanjaan sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat akan semakin kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrument kuesioner kepada masyarakat sehingga diketahui kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan melakukan pengamatan langsung ke Pemerintah Daerah, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan menggunakan model pendekatan kualitatif.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Albasiah, O. A. (2012). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1*(2).
- Bastian, I., & Soepriyanto, G. (2003). Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah. *Salemba Empat*.
- Bappenas, 2003.
- Darmadi, H. (2013). *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Depdagri, 1997. Kepmendagri No.600.900-327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Fahmi, I. (2012). Analisis kinerja keuangan. *Bandung: Alfabeta, 3*.
- Halim, A. (2002). Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. *Yogyakarta: Seri Bunga Rampai UUP AMP YMPN*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revi). Jakarta: Salemba Empat.
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4*(2).
- <https://ppid.jakarta.go.id>.
- Ikhsan, A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Ciptapustaka.
- Kurniawati, N. (2016). Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Manajemen, 3*(1).
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14*(2).



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mustarim, I., Rosnawintang, R., & Akib, M. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–19.
- Noor, J. (2011). *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2006 Tentang Standar Akuntan Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Salnatun, U. (2016). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan Dengan Menggunakan Konsep Value for Money tahun 2011-2015*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Septianingrum Putri, R. (2018). *Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Persepektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung.
- Silaen, S. (2018). *Metode Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

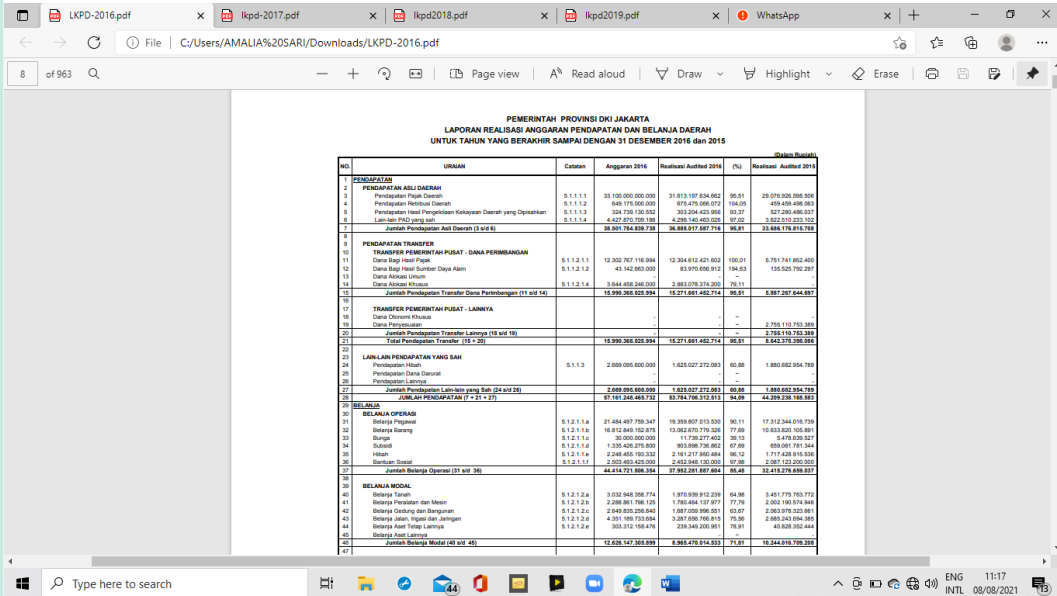
### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Litrase Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2005 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016



No	URAIAN	Kategori	Anggaran 2016	Realisasi Actual 2016	%	Saldo Budget	
						2016	2015
<b>PENDAPATAN</b>							
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>						
2	Penerimaan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	33.100.000.000.000	31.813.107.634.862	96,11	23.076.026.969.506	
3	Penerimaan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	849.175.000.000	876.475.000.072	103,20	459.459.489.063	
4	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lainnya (PAD yang lain)	5.1.1.1.3	324.750.000.000	323.204.000.000	99,51	527.201.448.021	
5		5.1.1.1.4	4.427.870.700.148	4.298.140.481.200	97,07	1.022.510.203.102	
6	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 s.d 5)</b>		<b>38.601.745.000.148</b>	<b>36.808.817.087.134</b>	<b>95,31</b>	<b>33.066.176.079.732</b>	
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>							
7	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMBANGUNAN</b>						
8	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	12.302.767.116.994	12.304.612.421.803	100,01	6.761.741.964.400	
9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	43.142.000.000	83.970.656.912	194,63	135.025.760.291	
10	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	-	-	-	-	
11	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	1.644.488.248.000	2.883.078.374.200	175,11	1.807.387.444.887	
12	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (1 s.d 4)</b>		<b>13.989.306.000.000</b>	<b>15.271.661.452.715</b>	<b>109,11</b>	<b>8.569.149.169.578</b>	
13	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>						
14	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
15	Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	
16	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (1 s.d 3)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.765.110.763.380</b>	
17	<b>Total Pendapatan Transfer (1 s.d 6)</b>		<b>13.989.306.000.000</b>	<b>15.271.661.452.715</b>	<b>109,11</b>	<b>11.334.260.932.958</b>	
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAMA</b>							
18	Penerimaan Hibah	5.1.1.3	2.608.000.000.000	1.628.027.272.083	62,43	1.880.682.954.789	
19	Penerimaan Dana Donor	-	-	-	-	-	
20	Penerimaan Lainnya	-	-	-	-	-	
21	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sama (1 s.d 3)</b>		<b>2.608.000.000.000</b>	<b>1.628.027.272.083</b>	<b>62,43</b>	<b>1.880.682.954.789</b>	
22	<b>Jumlah Pendapatan (1 s.d 21)</b>		<b>54.998.051.000.148</b>	<b>53.704.706.312.815</b>	<b>97,48</b>	<b>44.298.038.188.681</b>	
<b>BELANJA</b>							
<b>BELANJA OPERASI</b>							
23	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1	21.484.487.788.347	19.398.807.013.038	90,11	11.312.344.016.738	
24	Belanja Barang	5.1.2.1.1.2	16.812.849.192.875	13.062.670.779.328	77,69	10.833.820.005.861	
25	Belanja	5.1.2.1.1.3	16.500.000.000	11.790.000.000	71,45	8.479.029.021	
26	Belanja	5.1.2.1.1.4	1.335.420.270.800	903.898.736.800	67,39	609.091.781.344	
27	Hibah	5.1.2.1.1.5	2.348.660.100.000	9.161.317.400.000	390,12	1.717.629.919.004	
28	Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.6	1.203.493.420.000	2.482.048.100.000	206,19	1.087.120.200.000	
29	<b>Jumlah Belanja Operasi (1 s.d 28)</b>		<b>44.474.711.480.044</b>	<b>37.842.381.487.466</b>	<b>85,10</b>	<b>28.473.076.498.937</b>	
<b>BELANJA MODAL</b>							
30	Belanja Tanah	5.1.2.1.2.1	3.032.848.368.774	1.870.809.912.239	61,68	3.481.770.763.772	
31	Belanja Perawatan dan Merenovasi	5.1.2.1.2.2	3.388.961.788.128	1.786.664.019.971	52,73	2.002.160.216.646	
32	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2.3	2.848.830.250.840	1.687.000.000.000	59,25	2.063.970.223.961	
33	Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	5.1.2.1.2.4	4.351.189.750.000	2.287.000.000.000	52,56	3.664.241.648.385	
34	Belanja Asat Tetap Lainnya	5.1.2.1.2.5	303.312.188.478	239.349.200.961	78,91	40.826.392.444	
35	Belanja Lainnya	-	-	-	-	-	
36	<b>Jumlah Belanja Modal (1 s.d 35)</b>		<b>11.626.147.388.999</b>	<b>6.864.470.814.633</b>	<b>59,05</b>	<b>10.244.016.769.268</b>	

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Pemrov DKI Jakarta Tahun 2017

PEREMPTARAN PROVINSI DKI JAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2017	Realisasi Audited 2017	[%]	Saldo DIPA
						Per 31 Desember 2017
<b>PENDAPATAN</b>						
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
2	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	35.200.000.000.000	38.000.702.286.176	103,23	31.613.197.634.602
3	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	600.102.300.000	624.137.243.750	91,76	676.470.066.612
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dialokasikan	5.1.1.1.3	400.833.884.841	409.479.654.673	102,09	393.204.423.938
5	Lain-lain PAD yang lain	5.1.1.1.4	5.31.841.841.854	6.200.000.013.124	112,33	4.295.140.623.035
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (2 s.d 5)		41.837.977.826.535	43.961.489.897.743	105,31	36.888.017.687.176
7	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
8	<b>TRANSFER PEREMPTARAN PUSAT - DIANA PERMIBANGGAN</b>					
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	15.394.527.488.000	16.609.608.020.001	107,94	12.304.612.421.002
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	132.520.583.000	241.800.620.262	182,68	83.970.606.912
11	Dana Alokasi Umum		-	-	-	-
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	3.109.283.548.000	2.121.001.939.669	67,88	2.883.078.374.205
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)		18.603.810.899.000	18.969.291.189.932	101,96	15.217.649.422.114
14	<b>TRANSFER PEREMPTARAN PUSAT - LAINNYA</b>					
15	Dana Operasi Khusus		-	-	-	-
16	Dana Perimbangan		-	-	-	-
17	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (15 s.d 16)		-	-	-	-
18	Total Pendapatan Transfer (14 + 17)		18.603.810.899.000	18.969.291.189.932	101,96	15.217.649.422.114
19	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SARI</b>					
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.134.016.600.000	1.953.107.172.148	91,52	1.626.027.272.283
21	Pendapatan Dana Estimasi		-	-	-	-
22	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang SARI (20 s.d 22)		2.134.016.600.000	1.953.107.172.148	91,52	1.626.027.272.283
24	<b>Jumlah Realisasi Pendapatan (1 s.d 23)</b>		42.575.805.226.535	44.924.887.069.823	105,53	53.744.706.381.573
25	<b>BELANJA</b>					
26	<b>BELANJA OPERASI</b>					
27	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1	22.000.123.770.800	20.245.614.324.292	89,96	19.309.807.613.539
28	Belanja Belanja dan Jasa	5.1.2.1.1.2	18.722.288.960.178	13.892.113.226.889	71,66	13.042.070.779.320
29	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.3	35.556.297.520	31.807.471.844	86,71	31.708.277.012
30	Belanja Gaji	5.1.2.1.1.4	1.621.369.347.884	1.400.014.616.120	73,71	900.899.706.812
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.5	1.472.760.020.328	1.112.029.302.613	70,51	2.145.217.866.484
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.6	3.223.840.790.000	3.202.081.640.000	99,04	2.452.244.130.000
33	Jumlah Belanja Operasi (27 s.d 32)		49.366.668.679.777	39.868.196.615.607	79,29	37.952.211.887.653
34	<b>BELANJA MODAL</b>					
35	Belanja Tanah	5.1.2.1.2.1	2.241.240.188.724	1.291.046.893.545	57,63	1.576.936.612.239
36	Belanja Prasarana dan Sarana	5.1.2.1.2.2	2.837.260.491.685	2.904.090.469.201	90,28	1.785.464.137.297
37	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2.3	8.234.260.723.880	5.837.262.282.205	70,43	1.687.009.066.031
38	Belanja Jalan, Jembatan dan Jangkar	5.1.2.1.2.4	2.462.235.688.794	1.974.050.844.120	79,17	3.287.606.706.015
39	Belanja Ases dan Tatal Lainnya	5.1.2.1.2.5	10.427.773.430	7.068.774.200	62,51	226.346.200.001
40	Jumlah Belanja Modal (35 s.d 39)		23.996.568.776.403	13.077.234.426.071	54,54	10.283.366.720.583
41	<b>Jumlah Realisasi Belanja (25 s.d 40)</b>		73.362.434.443.180	57.941.421.041.878	77,75	64.028.073.102.156

 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Pemrov DKI Jakarta Tahun 2018

NO	URAIAN	Catatan	Anggaran 2018	Realisasi	
				31 Desember 2018 (Revisi)	(%) Per 31 Desember 2017 (Revisi)
<b>1. PENDAPATAN</b>					
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
2	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.121.000.000.000	37.629.912.287.212	98,48
3	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	671.400.000.000	578.516.620.584	86,18
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3	692.746.214.202	692.692.276.233	100,04
5	Lain-lain PAD yang lain	5.1.1.5.4	4.929.847.844.062	4.619.732.206.152	93,70
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 sub 6)		44.360.077.888.884	43.337.138.662.811	97,69
7	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
8	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAMAI PEMBANGUNAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1	18.100.337.494.000	15.926.187.996.222	88,00
12	Dana Bagi Hasil Sumbah Dana Lain	5.1.2.1.2	188.891.120.000	193.259.499.489	102,33
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.3	3.126.629.255.000	2.845.693.991.214	91,02
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Pembinaan (11 sub 13)		21.416.857.869.000	17.965.137.977.124	83,93
15	Jumlah Pendapatan Transfer (14)		21.416.857.869.000	17.965.137.977.124	83,93
16	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
17	Pendapatan Hibah	5.1.1.5	67.996.000.000	63.511.071.898	93,41
18	Jumlah Pendapatan Lainnya yang Sah (16 sub 17)		67.996.000.000	63.511.071.898	93,41
19	Jumlah PENDAPATAN (1 + 19)		66.894.931.722.884	61.236.824.747.833	91,56
<b>2. BELANJA</b>					
20	<b>BELANJA OPERASI</b>				
21	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.4	23.620.650.881.578	21.852.416.650.559	92,51
22	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.5	29.479.877.008.398	16.919.760.405.273	57,43
23	Belanja Bangun	5.1.2.1.1.6	61.500.000.000	46.566.868.889	75,72
24	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.7	4.210.000.000.000	2.849.949.492.380	67,71
25	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.8	1.899.296.892.004	1.422.719.028.238	75,21
26	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.9	4.363.520.562.000	4.053.970.562.586	92,94
27	Jumlah Belanja Operasi (21 sub 26)		61.244.846.644.974	48.613.716.208.881	79,40
28	<b>BELANJA MODAL</b>				
29	Belanja Tanah	5.1.2.1.2.1	6.612.688.056.435	5.493.375.929.929	83,07
30	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.2.2	3.224.320.403.851	2.203.260.224.495	68,36
31	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2.3	4.730.816.814.237	3.787.773.213.270	80,07
32	Belanja Akumulasi dan lainnya	5.1.2.1.2.4	2.079.376.581.111	2.195.871.805.724	105,60
33	Belanja Asum Tambah Lainnya	5.1.2.1.2.5	102.157.854.496	137.862.746.117	134,95
34	Jumlah Belanja Modal (29 sub 33)		17.448.979.695.129	14.118.682.881.541	80,94
35	<b>BELANJA TAK TERORONG</b>				
36	Belanja Tak Terorong	5.1.2.1.3	2.666.421.362.833	1.824.529.559	68,43
37	Jumlah Belanja Tak Terorong (36)		2.666.421.362.833	1.824.529.559	68,43
38	Jumlah BELANJA (20 + 37 + 41)		74.724.243.748.933	61.664.848.818.987	82,52
<b>3. TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER SEBAYAAN KEUANGAN</b>					
41	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	6.1.3	308.168.520.000	340.892.047.100	110,62
42	Jumlah Transfer (41 + 42)		308.168.520.000	340.892.047.100	110,62

## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019

NO	URAIAN	Catatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019 Audited (%)		Realisasi 2018 Audited
				2019	2018	
<b>PENDAPATAN</b>						
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
2	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	44.540.000.000.000	45.208.122.000.326	92,48	37.538.812.327.312
3	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	718.131.000.000	587.354.491.230	81,71	578.550.603.394
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	418.200.274.400	619.486.488.480	100,17	592.960.276.363
5	Lain-lain PAD yang lain	5.1.1.1.4	4.375.210.075.000	4.202.437.000.799	96,04	4.619.712.395.322
6	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 s.d 5)</b>		<b>49.041.540.349.400</b>	<b>48.737.460.969.835</b>	<b>99,39</b>	<b>43.327.136.602.811</b>
7						
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAERAH PEMBANGUNAN</b>					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	18.019.803.810.075	11.585.304.508.454	64,29	15.028.187.596.222
11	Dana Bagi Hasil Kuerasi Cukai Alam	5.1.1.2.1.2	132.868.728.840	113.265.027.731	85,12	103.379.491.468
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	3.198.203.037.000	2.798.000.498.394	87,50	2.645.603.991.214
13	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Pembangunan (11 s.d 13)</b>		<b>21.350.875.575.915</b>	<b>14.686.369.934.579</b>	<b>68,82</b>	<b>17.686.177.972.862</b>
14						
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
16	Dana Perimbangan	5.1.1.2.2	57.178.308.000	57.178.308.000	100,00	-
17	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16)</b>		<b>57.178.308.000</b>	<b>57.178.308.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
18	<b>Total Pendapatan Transfer (14 + 16)</b>		<b>21.366.242.484.815</b>	<b>14.691.471.558.179</b>	<b>68,11</b>	<b>17.686.177.972.862</b>
19						
20	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH</b>					
21	Pendapatan Hibah	5.1.1.5	2.780.173.000.000	2.041.198.418.007	73,39	53.911.671.888
22	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Bah (21)</b>		<b>2.780.173.000.000</b>	<b>2.041.198.418.007</b>	<b>73,39</b>	<b>53.911.671.888</b>
23	<b>Jumlah Pendapatan (7 + 19 + 22)</b>		<b>74.387.487.375.485</b>	<b>62.300.478.932.068</b>	<b>83,67</b>	<b>61.251.824.747.813</b>
24						
25	<b>BELANJA</b>					
26	<b>BELANJA OPERASI</b>					
27	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.4	23.278.718.198.848	22.018.852.174.914	94,59	21.852.416.000.000
28	Belanja Barang	5.1.2.1.1.5	23.878.819.798.778	20.807.658.918.295	86,76	16.918.780.405.273
29	Belanja Bangun	5.1.2.1.1.6	78.000.000.000	80.345.405.300	73,36	84.046.000.000
30	Belanja Laba-laba	5.1.2.1.1.7	4.797.631.637.216	2.782.933.713.289	58,01	2.840.949.492.360
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.8	2.753.048.702.361	2.475.388.868.419	89,51	1.422.102.000.000
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.11	4.488.428.312.000	4.402.328.917.189	98,06	4.083.970.192.388
33	<b>Jumlah Belanja Operasi (27 s.d 32)</b>		<b>68.344.662.641.293</b>	<b>62.548.176.174.313</b>	<b>91,54</b>	<b>46.943.746.500.000</b>
34						
35	<b>BELANJA MODAL</b>					
36	Belanja Tanah	5.1.2.1.2.4	5.362.043.078.862	2.338.517.728.818	43,61	5.483.370.929.929
37	Belanja Peralatan dan Meubel	5.1.2.1.2.5	3.213.048.708.101	2.820.296.208.889	88,11	2.583.500.204.889
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2.6	5.271.088.319.964	3.811.246.212.088	72,31	3.781.773.213.310
39	Belanja Jalan, Jembatan dan Bangunan	5.1.2.1.2.7	3.284.188.788.454	2.405.364.222.313	73,21	2.188.007.889.779
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.2.8	293.270.270.968	165.165.265.784	56,31	137.862.746.117
41	<b>Jumlah Belanja Modal (36 s.d 40)</b>		<b>17.344.263.142.149</b>	<b>11.691.427.778.889</b>	<b>67,47</b>	<b>14.118.608.887.843</b>
42						
43	<b>BELANJA TAK TERDIDDA</b>					
44	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.3	269.318.083.909	1.613.963.000	0,60	1.924.528.000

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**





## Lampiran 5: Laporan Realisasi Anggaran Pemrov DKI Jakarta Tahun 2020

PEREMINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2020	Realisasi	
				31 Desember 2020 (Realisasi)	(%) 21 Desember 2019 (Realisasi)
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	32.480.000.000.000	31.895.263.277.823	98,20
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	468.413.750.000	486.333.944.408	103,84
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	844.471.501.251	872.491.534.838	103,33
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.293.100.985.380	4.300.666.954.573	101,34
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)</b>		<b>38.085.985.616.631</b>	<b>37.474.734.711.193</b>	<b>98,38</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMIBANGKAN</b>				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	13.587.076.479.733	13.587.076.479.733	100,00
11	Dana Bagi Hasil Sumbah Dana Alam	5.1.1.2.1.2	60.862.000.352	60.862.000.352	100,00
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	3.450.403.588.783	3.249.763.928.377	94,21
13	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 12)</b>		<b>17.099.342.073.868</b>	<b>16.897.722.313.832</b>	<b>98,89</b>
14	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
15	Dana Perimbangan	5.1.1.2.2	65.178.873.300	65.178.873.300	100,00
16	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (15)</b>		<b>65.178.873.300</b>	<b>65.178.873.300</b>	<b>100,00</b>
17	<b>Total Pendapatan Transfer (13 + 16)</b>		<b>17.118.829.948.828</b>	<b>16.962.899.288.832</b>	<b>99,09</b>
18	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
19	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.030.064.100.000	1.509.353.237.802	74,35
20	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (19)</b>		<b>2.030.064.100.000</b>	<b>1.509.353.237.802</b>	<b>74,35</b>
21	<b>Jumlah Pendapatan (7 + 17 + 20)</b>		<b>42.146.914.748.459</b>	<b>40.997.794.322.127</b>	<b>97,29</b>
22	<b>BELANJA</b>				
23	<b>BELANJA OPERASI</b>				
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1	18.991.305.034.794	18.886.870.074.289	99,42
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.2	18.098.721.023.064	18.715.817.862.811	103,43
26	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.3	78.000.000.000	78.000.000.000	100,00
27	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.4	4.028.995.241.433	3.828.195.400.866	95,02
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.5	2.373.116.810.782	1.881.883.219.116	79,30
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.6	5.113.960.031.060	4.803.815.068.851	93,94
30	Belanja Kerasa Pijag Selsih kurs dalam pembekalan Belanja SBB (S/D)	5.1.2.1.1.8	-	244.634.852	-
31	<b>Jumlah Belanja Operasi (24 s.d 30)</b>		<b>49.161.884.841.118</b>	<b>48.835.699.863.286</b>	<b>99,17</b>
32	<b>BELANJA MODAL</b>				

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA